

Ketahanan Energi Nasional Rapuh

Oleh : SITI MAEMUNAH

Indonesia, yang pada kebangkitan perekonomiannya sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an mengandalkan minyak dan gas, pernah begitu diperhitungkan dalam percaturan politik ekonomi energi internasional lewat perannya di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Kini Indonesia terseok-seok menutupi kebocoran disana-sini dari dinding ketahanan energi nasionalnya.

Sepanjang lebih dari tiga dasawarsa, Indonesia mengelola tiga perempat cadangan minyaknya yang terus menyusut, serta seperenam dari cadangan gas alamnya yang luar biasa. Laju produksi minyak bumi Indonesia terus menurun teratur sejak 1995, dan cadangan tersisa akan habis pada 10-20 tahun mendatang.

Turunnya Soeharto diikuti terbukanya borok-borok pengelolaan sumber daya energi nasional, dengan terungkapnya berbagai skandal dan korupsi serta amburadulnya pengaturan investasi di bidang ini. Meski yang terungkap bisa jadi hanya puncak gunung es dari tumpukan masalah sejarah panjang pengelolaan energi yang amat tertutup, dari rezim ke rezim kekayaan sumber daya energi belum (juga) diperlakukan sebagai sumber prioritas untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan produktivitas rakyat Indonesia. Minyak dan gas bumi diperlakukan semata-mata sebagai sumber keuangan negara, yang ujung-ujungnya untuk membayar bunga utang luar negeri yang membelit.

Dua wacana

Potret paling mutakhir dapat dilihat pada tawaran kebijakan Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berkuat pada program hemat energi dan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai jalan keluar pemenuhan kebutuhan energi domestik serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Rapat kabinet terbatas 12 September 2005 telah memutuskan harga BBM naik pada awal Oktober 2005.

Hanya dua wacana yang secara konsisten dan terus diangkat pemerintah dalam menaikkan harga BBM selama ini, (1) beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian berat karena naiknya harga minyak dunia serta tingginya konsumsi BBM. (2) Pernyataan yang menjamin subsidi akan dipastikan sesuai sasaran. Publik tidak pernah memperoleh penjelasan lengkap bahwa salah urus pengelolaan energi telah menimbulkan dampak berganda (multiplier effect) yang memperjelas potret rapuhnya ketahanan dan kedaulatan energi negara ini.

Kasus tiga industri besar di Aceh Utara tiga tahun lalu yang kembali menghangat, yakni rencana penutupan (lagi) Pupuk Iskandar Muda (PIM) I, merupakan ilustrasi terbaik yang dapat menggambarkan perilaku penyelenggaraan negara, terutama dalam mengurus sumber daya energi. Pada Desember 2003, sebulan lebih pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PIM I, dan pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA) berhenti beroperasi karena kehabisan bahan baku utama, yakni pasokan gas dari ExxonMobil Indonesia (EMOI). PIM I setidaknya merugi hingga Rp 300 miliar, sementara AAF tiap bulan harus mengeluarkan Rp 8 miliar untuk biaya karyawan dan perawatan lainnya.

Eksplorasi berlebihan sejak 1978 telah menguras cadangan gas Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat cadangan mulai menipis, EMOI lebih memprioritaskan produksinya guna memenuhi kontrak dengan pembeli luar negeri, terutama Korea dan Jepang. Kilang-kilang lokal pun merana. EMOI beruntung, tidak bisa digugat karena kontrak dengan ketiga industri besar di NAD itu resminya sudah berakhir.

Apa efek simultan yang terjadi? Pemerintah mengambil alih 75 juta kubik gas dari Arun yang harus dikirim ke luar negeri. Untuk mengganti gas itu pemerintah membeli kargo gas dari Oman seharga enam dollar AS per mBtu, jauh di atas harga rata-rata pasar internasional. Sedikitnya dana Rp 360 miliar harus disediakan untuk menggantinya.

Contoh kasus itu hanya puncak gunung es dari potret rapuhnya ketahanan energi negara ini. Eksplorasi skala besar sumber-sumber energi tak terbarukan untuk memasok pasar luar negeri sepanjang lebih tiga dasawarsa, menghancurkan tata produksi dan konsumsi energi dalam negeri.

Seolah bencana mendadak

Sudah sejak lama dunia mengetahui harga BBM akan terus naik seiring meningkatnya konsumsi minyak dunia dan berkurangnya cadangan minyak akibat eksploitasi tak terkendali. Bagi Indonesia, yang 90 persen konsumsinya bergantung kepada BBM, keadaan itu berarti masalah yang amat serius. Karena seluruh detak kehidupan bergantung pada BBM.

Yang menjengkelkan, naiknya harga minyak dunia diperlakukan seakan-akan sebagai sebuah bencana yang mendadak datang. Di mata publik, kebijakan pemerintah dilihat hanya sebagai siasat serta tindakan reaktif, tamal sulam, dan sama sekali tidak menyentuh inti masalah, yakni ketahanan energi nasional. Negeri ini persis seperti buruh kasar upah harian, yang setiap malam pusing memikirkan makanan bagi keluarganya esok hari. Lusa adalah perjuangan yang lain lagi.

Kenaikan harga BBM awal Oktober 2005 akan memuluskan dampak berganda mulai dari naiknya transportasi, ongkos produksi barang dan jasa, hingga harga barang-barang kebutuhan pokok. Kenaikan ini akan menaikkan harga produk energi lain, seperti listrik. Hingga kini 44 persen kebutuhan bahan bakar pembangkit Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah BBM, sisanya dari batu bara dan gas. Dengan kata lain, selama ini PLN menghabiskan 34 persen kebutuhan BBM domestik. Naiknya harga BBM mengakibatkan biaya produksi listrik naik.

Bagai buah simalakama, PLN harus memilih tiga skenario yang sama-sama sulit. Pertama, PLN tetap menggunakan bahan bakar dengan pembangkit minyak (solar) yang dibeli dengan harga pasar. Kedua, PLN mengganti bahan bakar pembangkitnya dengan gas. Atau, ketiga, menggantinya dengan batu bara. Memilih gas akan menyulitkan PLN karena harganya tinggi dan terbatasnya pasokan di pasar internasional. Jangankan untuk listrik, hingga kini pemerintah belum berhasil membeli gas di pasar internasional guna memenuhi komitmennya kepada pabrik PIM I di NAD.

Penggunaan batu bara juga terbentur kenaikan harga, akibat biaya produksi dan langkanya solar. Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) telah meminta kenaikan harga dari Rp 273.000 per ton menjadi Rp 300.000 hingga Rp 350.000 per ton. Mereka lebih suka menjual

ke pasar internasional yang harganya lebih mahal, mencapai 45-50,45 dollar AS per ton seperti pernah terjadi di tahun 2004.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya dan Paiton sudah terancam krisis bahan bakar akibat larinya pasokan batu bara ke pasar ekspor. Demikian pula dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PT PLN (PT Indonesia Power dan PT Pembangunan Jawa Bali) sebagai pembeli dan pemakai terbesar tentu bersiap-siap untuk menaikkan harga listrik bagi konsumennya karena semakin tingginya biaya produksi batu bara.

Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tidak bisa dihindari. Apa yang terjadi kemudian? Naiknya TDL mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang produksinya menggunakan listrik.

Kenaikan harga BBM biasanya diikuti krisis BBM. Krisis BBM merupakan pintu gerbang bagi kesusahan berkepanjangan yang dihadapi rakyat. Beberapa ilustrasi di berbagai daerah menyusul kenaikan harga BBM Maret lalu menunjukkan indikasi kuat tentang pemiskinan masif yang terjadi di berbagai pelosok Indonesia. Tutupnya 140 dari 220 usaha kecil menengah (UKM) di Majalaya, Jawa Barat, juga pabrik-pabrik keramik di Gresik yang merumahkan karyawannya, hingga 77 perusahaan tekstil dan produk tekstil berhenti operasi di Jawa Bali mengakibatkan 20.000 orang kehilangan pekerjaan.

Surat kabar nasional memberitakan beberapa dampak jika harga BBM kembali naik bulan Oktober. Kenaikan solar akan mengakibatkan 3,4 juta nelayan di Pulau Jawa, Bali, NTT, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku tidak melaut. Ledakan kemiskinan diperkirakan mencapai 70 juta-80 juta rakyat Indonesia dari sebelumnya 36 juta orang berdasarkan data BPS.

Kenaikan harga BBM Oktober jelas akan kembali memukul rakyat. Krisis energi membuka pintu bagi reaksi berantai terhadap semua sektor pembangunan. kebangkrutan Indonesia akibat salah urus pengelolaan sumber daya alam, khususnya energi, bukan lagi sekadar ancaman, tetapi ia sudah berdiri tegak di ambang pintu, karena harga minyak dunia akan terus membubung naik. Rencana liberalisasi ritel perdagangan BBM pada November 2005 melengkap potret kerapuhan ketahanan energi nasional.

Sebanyak 217 juta rakyat Indonesia tidak akan punya pilihan selain menjadi konsumen yang baik dan patuh. Masihkah kita percaya lampu merah kebangkrutan akan terjawab dengan sebuah siasat kehumasan bernama hemat energi?

Siti Maemunah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)